

Karya Tulis Utama
Karya Tulis Magister

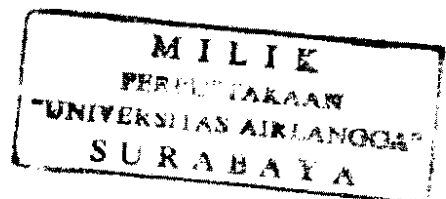
**DAMPAK KEBIJAKSANAAN DISTRIBUSI KREDIT
BERDASARKAN SEKTOR EKONOMI TERHADAP
KREDIT BERMASALAH PASCA PAKTO 1988 DI JAWA TIMUR
PERIODE TAHUN 1991/1992 SAMPAI DENGAN TAHUN 1996/1997**

KARYA TULIS UTAMA

Untuk memenuhi sebagian persyaratan
dalam mencapai derajat Magister Manajemen



KIK
MM. 69/99
Pra
d



diajukan oleh
Sidi Pramono
Nim 049510191 M

**PROGRAM MAGISTER MANAJEMEN
PASCASARJANA UNIVERSITAS AIRLANGGA**

**SURABAYA
1997**

**DAMPAK KEBIJAKSANAAN DISTRIBUSI KREDIT
BERDASARKAN SEKTOR EKONOMI TERHADAP
KREDIT BERMASALAH PASCA PAKTO 1988 DI JAWA TIMUR
PERIODE TAHUN 1991/ 1992 SAMPAI DENGAN TAHUN 1996/ 1997**

Diajukan oleh :
Sidi Pramono
Nim. 049510191 M

Disetujui :

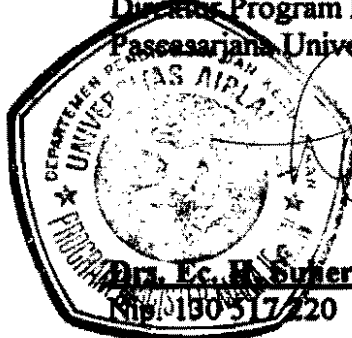
Pembimbing Utama,



Dr. H. Imam Syakir, SE.
Nip. 130 675 531

Tanggal 23-7-97

Mengetahui,
Dekan Program Magister Manajemen
Pasca Sarjana Universitas Airlangga,



Dr. Ec. H. Suherman Rosyidi, GDip., EcDev., M.Com.
Nip. 0190 517 720

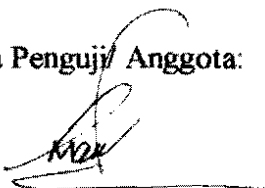
Tanggal 26/8/97

**PERSETUJUAN PERBAIKAN/ PENYEMPURNAAN
KARYA TULIS UTAMA**

Team Penguji menyatakan bahwa Saudara Sidi Pramono telah melakukan penyempurnaan/ perbaikan terhadap Karya Tulis Utamanya yang berjudul *Dampak Kebijakan Distribusi Kredit Berdasarkan Sektor Ekonomi Terhadap Kredit Bermasalah Pasca Pakto 1988 di Jawa Timur Periode Tahun 1991/1992 Sampai Dengan Tahun 1996/1997*, sebagaimana yang telah disarankan oleh Team Penguji:

Team Penguji

Ketua Penguji/ Anggota:



Dr. H. Amiruddin Umar, SE

Tanggal : 8-8-1997

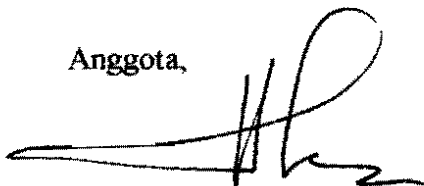
Sekretaris/ Anggota:



Dr. H. Imam Syakir, SE

Tanggal : 23-7-1997

Anggota,



Dr. H. M. Harry Susanto, SU

Tanggal : 20-8-1997

ABSTRAKSI

Dewasa ini situasi dunia telah mengalami perubahan yang sangat cepat di bidang ekonomi yang ditandai dengan adanya persaingan yang semakin ketat. Kondisi demikian terjadi pula di Indonesia yang membawa dampak kebutuhan masyarakat terhadap layanan perbankan, semakin meningkat.

Guna menunjang kegiatan di atas berbagai kebijakan telah diberlakukan oleh otoritas moneter melalui paket deregulasi perbankan tanggal 1 Juni 1983 yang terkenal dengan sebutan Pakjun 1983. Dampak positif dari Pakjun 1983 adalah meningkatnya jumlah dana pihak ketiga yang mampu dihimpun oleh bank. Sebagai kelanjutan dari kebijakan tersebut kemudian dikeluarkan Paket Deregulasi 27 Oktober 1988 yang lebih dikenal dengan Pakto 88. Salah satu tujuan dari Pakto 1988 adalah memberikan kemudahan dalam pendirian bank, kantor cabang dan kantor cabang pembantu.

Sebagai dampak dari Pakto '88 jumlah bank yang tadinya hanya ada 111 bank umum dengan 1.728 unit kantor bank pada tahun 1988, lalu meningkat menjadi 237 unit dengan 4.793 unit kantor bank pada tahun 1994. Keadaan demikian ini tidak hanya menimbulkan meningkatnya dana pihak ketiga yang mampu dihimpun oleh bank, tetapi juga meningkatnya jumlah dana yang disalurkan ke masyarakat. Meningkatnya dana yang disalurkan kepada masyarakat menurut sektor ekonomi mengakibatkan timbulnya kredit bermasalah sesuai dengan kategorinya. Berdasarkan ini semua, maka dalam rangka penulisan Karya Tulis Utama perlu diteliti dengan mengambil judul: **DAMPAK KEBIJAKSANAAN DISTRIBUSI KREDIT BERDASARKAN SEKTOR EKONOMI TERHADAP KREDIT BERMASALAH PASCA PAKTO 1988 DI JAWA TIMUR PERIODE TAHUN 1991/1992 SAMPAI DENGAN TAHUN 1996/1997.**

Penelitian ini menggunakan data sekunder berdasarkan series data tahun 1991/1992 triwulan kedua sampai dengan tahun 1996/1997 triwulan ketiga, sehingga jumlah kasus sebanyak 22 kasus, yang bersumber dari Bank Indonesia, Statistik Ekonomi dan Keuangan Daerah Jawa Timur berbagai edisi. Untuk membuktikan hipotesis penelitian digunakan model statistik *analysis of variance* (ANOVA) dan selisih dua rata-rata.

Kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian ini adalah ada perbedaan rata-rata distribusi kredit bermasalah menurut sektor ekonomi, baik pada bank pemerintah maupun bank swasta di Jawa Timur. Selain itu diperoleh hasil pula bahwa rata-rata total kredit bermasalah bank pemerintah lebih besar dibandingkan dengan bank swasta di Jawa Timur. Dari kesimpulan secara statistik tersebut kesemuanya dengan tingkat signifikansi kurang dari 1%.

Selain kesimpulan secara statistik ditemukan pula bahwa kredit yang disalurkan pada masing-masing sektor ekonomi yang semakin besar, maka posisi kredit bermasalahnya semakin besar pula. Jangka waktu kredit investasi maupun modal kerja pada bank pemerintah rata-rata lebih lama dibandingkan dengan bank swasta di Jawa Timur. Persentase kredit bermasalah bank pada bank pemerintah maupun bank swasta di Jawa Timur sebagian besar pada sektor ekonomi perindustrian, perdagangan, hotel dan restoran. Hal ini dapat disebutkan bahwa posisi kredit bermasalah sebagian besar berada di Wilayah Kerja Bank Indonesia Surabaya.

Kesimpulan lain yang dihasilkan dalam penelitian ini adalah timbulnya kredit bermasalah tidak sepenuhnya disebabkan oleh kenakalan nasabah, tetapi dapat pula karena kurang profesionalnya pihak bank itu sendiri. Hal ini terjadi terutama untuk jenis usaha baru, umumnya bank masih kurang memahaminya.